

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

Implementation Of Regional Regulation (PERDA) No. 6 Of 2021 Regarding Infrastructure Development In Giriwoyo Village Giriwoyo Sub-district Wonogiri Regency

Yuan Isha Mahastu¹, Drs. Joko Suranto, M.Si², Dra. Damayanti Suhita, M.Si³

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

mahastuyuan@gmail.com joko.suranto@unisri.ac.id diekatik@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu peran yang sangat penting bagi suatu daerah terutama di desa. Banyak manfaat yang bisa dirasakan seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakatnya dan yang sangat penting adalah memberantas kemiskinan menuju Indonesia maju. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No.6 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Edward III (1980:1) dengan indikator communication (komunikasi), resources (sumber daya), disposition (disposisi), bureaucratic structure (struktur birokrasi). Metode pada pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No.6 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri bisa dikatakan cukup baik dilihat dari ke empat indikatornya. Tapi masih disayangkan dari hasil wawancara pada bagian indikator komunikasi masih ditemui beberapa masyarakat yang belum memahami dengan jelas mengenai Perda No. 21 Tahun 2019 yang menjadi dasar pondasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo. Dengan demikian untuk pihak pemerintah daerah desa setempat agar kedepannya lebih detail dalam mensosialisasikan program-program kepada masyarakat supaya bisa memahami dan paham dengan sangat jelas mengenai informasi program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur

Abstract

Infrastructure development plays a crucial role in a region, especially in rural areas. It offers numerous benefits such as improving the local economy, the well-being of the community, and, most importantly, eradicating poverty on the path to Indonesia's progress. This research aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 regarding Infrastructure Development in the Giriwoyo Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency.

In this study, the researcher employed a qualitative descriptive method based on Edward III's theory (1980:1) with indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection methods included observation, interviews, and documentation.

The research results indicate that the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 on Infrastructure Development in Giriwoyo Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency, can be considered relatively good based on these four indicators. However, it is unfortunate that, during interviews, some community members still did not have a clear understanding of Regional Regulation No. 21 of 2019, which serves as the foundation for implementing infrastructure development policies in Giriwoyo Village. Therefore, it is recommended that the local government in the area be more detailed in their efforts to disseminate information about these programs to the community to ensure a better understanding.

Keywords: Policy Implementation, Infrastructure Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur berperan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di tingkat lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperluas pembangunan dan meningkatkan koneksi antar wilayah, terutama di pedesaan, merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Adanya pembangunan infrastruktur di desa yang memadai seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut laman resmi Kementerian Keuangan (2022), rencana kebijakan fisik dan pengaturan anggaran APBN pada tahun

2023 yaitu “Meningkatkan kinerja produktivitas sebagai langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, dalam rangka mendukung produktivitas dan penguatan sosial ekonomi masyarakat, APBN akan terus dioptimalkan dalam menjalankan perannya. Fokus utama pada APBN tahun 2023 akan di berikan kepada salah satunya yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas.

Infrastruktur adalah dasar peradaban suatu negara dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan bersaing daerah tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan infrastruktur telah menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan transformasi ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia maju pada tahun 2045. Pentingnya pembangunan bagi

kemajuan suatu daerah tidak dapat dipungkiri. Faktor yang menghalangi kemajuan ekonomi di Indonesia, diantaranya yaitu keterlambatan dalam pembangunan fisik yang dicirikan oleh kualitas maupun kuantitas sarana prasarana yang tidak memadai sehingga pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia mengalami kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri mencakup 25 kecamatan pada total warga kisaran 1.043.576 jiwa pada tahun 2022. Secara geografis Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah sebesar 1.822 km². Luas wilayah yang cukup besar ini memberikan potensi yang dominan pada sektor perkebunan, pertanian & peternakan. Kabupaten Wonogiri posisinya strategis sebab ada di tenggara Provinsi Jawa Tengah dimana berdekatan secara langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta & Jawa Timur sehingga memudahkan dalam melakukan pertukaran perdagangan, transportasi, dan hubungan sosial dengan provinsi tetangga. Adanya potensi yang besar di sektor pertanian menjadikan mayoritas penduduk Kabupaten Wonogiri berprofesi sebagai petani seperti produksi padi dan umbi-umbian. Meskipun kawasan ini dikelilingi oleh hutan dan gunung serta memiliki tanah yang subur, masih banyak daerah pelosok pedalaman di Kabupaten Wonogiri yang pembangunan infrastrukturnya belum merata seperti infrastruktur jalan desa sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, salah satunya yaitu di Kecamatan Giriwoyo yang memiliki luas 100,60 km², terletak paling selatan di Kabupaten

Wonogiri dimana meliputi 16 desa dan 2 kelurahan. Kondisi infrastruktur jalan di Desa Giriwoyo mengalami kerusakan, terlihat dari kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Kerusakan tersebut dikarenakan sebagai unsur berupa usia jalan, berubahnya cuaca, suhu, keadaan tanah, bahan material, serta akibat dari adanya kendaraan berat yang melampaui kapasitasnya.

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta akan menghambat program pembangunan infrastruktur. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya seperti sumber daya, finansial, dan teknis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dapat menghambat kemampuan Desa Giriwoyo dalam memenuhi persyaratan yang ada di dalam peraturan. Dalam PerDa Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 berkaitan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Wonogiri pada periode tahun 2021-2026, disebutkan bahwa anggaran infrastruktur Kabupaten Wonogiri mencapai 30% pada APBD tahun 2023 yang dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan, bahkan belum termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan program pembangunan infrastrukturnya dengan dana yang terbatas. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis sejauh mana peraturan daerah No.6 Tahun 2021 telah berhasil diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Giriwoyo.

Dari latar belakang di atas, pengkaji minat melaksanakan pengkajian penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Infrastruktur di Desa Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri” berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada daerah tersebut.

TINJAUN PUSTAKA

a. Implementasi

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:7) menjabarkan bila implementasi adalah suatu tahap administratif umum yang bisa dipelajari ditaraf suatu program. pembangunan infrastruktur di Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara telah menjadi fokus penelitian. Berdasarkan teori Edward III, penelitian ini menyoroiti bahwa partisipasi aktif warga, kolaborasi lintas sektor, dan tekad dalam mengatasi rintangan memiliki peran sentral dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Dampak positif terlihat dalam peningkatan keterjangkauan, konektivitas, dan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan jembatan, jalan, serta pasokan air bersih. Penelitian menggunakan model Donal Van Metter dan Carl Van Horn mengenai implementasi aturan dibangunnya infrastruktur jalan di Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir Selatan. Hasilnya menunjukkan sukses dalam meningkatkan akses dan konektivitas wilayah, membuka peluang ekonomi, perdagangan, dan sosial. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis, dan isu lingkungan membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi kebijakan.

Kemudian Penelitian di Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memberikan manfaat signifikan bagi aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan aksesibilitas memicu pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperluas akses ke layanan penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan proyek menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi alokasi anggaran.

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melibatkan proses penyelenggaraan rencana dengan partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan penanganan tantangan teknis serta lingkungan. Evaluasi berkala, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Simpulan ini dapat menjadi panduan berharga bagi pengambil kebijakan dan semua pihak terkait dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di wilayah pedesaan.

b. Kebijakan

Kebijakan, sering disamakan dengan istilah lain seperti target, rencana, UU, atau putusan, sebenarnya merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi konflik. Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan adalah respons terhadap konflik dengan tujuan memecahkan, mengurangi, dan mencegah keburukan, sambil mendukung kebaikan. Menurut Ridwan dkk (2010:32) kebijakan adalah serangkaian langkah yang diambil

oleh individu atau kelompok untuk mengatasi permasalahan tertentu. Winarno dan Budi (2009:21) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan prinsip dan konsep sebagai dasar perencanaan untuk tindakan. Anderson (1984:113) menggolongkan kebijakan menjadi aturan prosedural dan substantif, yang berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan dan siapa yang terlibat dalam implementasinya. Nurcholis (2007:263) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan organisasi untuk mencapai target, dengan aturan sebagai panduan untuk mengatur perilaku. Secara keseluruhan, kebijakan adalah tanggapan terhadap masalah dengan niat mengatasi dampak negatif dan mendorong hal positif melalui langkah-langkah terarah dan metode optimal.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dijelaskan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh swasta dan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu van Horn & Van Meter (1995: 461). Artikel menyoroti bahwa sulitnya menentukan hasil kebijakan pada tahap ini karena mungkin ada dampak yang tidak terduga sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Kahya dan Zenju. Nugroho (2014:657) menekankan inti dari implementasi aturan adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Mulyadi menjabarkan bahwa implementasi aturan umumnya melibatkan perubahan yang mengaitkan beragam kelompok dan lapisan masyarakat dalam strategi implementasi kebijakan. Dengan merangkum beragam perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah rancangan sikap yang ditetapkan oleh swasta atau pemerintah,

termasuk individu dan kelompok, guna meraih target yang telah ditentukan.

d. Model-model Implementasi

1. George C. Edward III menyajikan model implementasi kebijakan yang memerlukan perhatian pada interaksi, disposisi, susunan birokrasi, dan sumber daya.

Dalam indikator implementasinya, komunikasi menjadi kunci utama, memastikan implementor memahami aturan dengan baik untuk menghindari distorsi dan resistensi dari kelompok sasaran. Selain itu, sumber daya seperti SDM, finansial, dan fasilitas pendukung menjadi penentu keberhasilan implementasi, bahkan jika aturan telah dijelaskan secara jelas. Disposisi, yang mencakup kejujuran dan perilaku demokratis, juga memainkan peran penting. Sikap positif dari penyelenggara dapat mendorong optimalitas implementasi, sementara struktur birokrasi, terutama SOP yang terorganisir, menjadi panduan krusial untuk setiap implementor.

2. Dalam implementasi Model Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel kunci yang melibatkan target dan ketetapan aturan, ciri khas kelompok, sumber daya, interaksi antar himpunan, tindakan penyelenggara, dan lingkup politik, ekonomi, serta sosial. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), indikator keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa aspek:
 - a) Standar dan Sasaran Kebijakan: Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana target aturan realistis dan dapat diwujudkan

dengan mempertimbangkan faktor sosio-kultural di tingkat penyelenggara aturan.

- b) Sumber Daya: Setiap langkah pelaksanaan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kriteria kerja yang ditetapkan aturan politik.
- c) Karakteristik Organisasi Pelaksana: Faktor seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi.
- d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait: Interaksi yang konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi menjadi kunci untuk memahami dan mencapai tujuan implementasi aturan publik.
- e) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana: Dampak positif atau negatif dari sikap penyelenggara aturan dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi, khususnya jika tindakan bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan masukan dari warga setempat.
- f) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: Faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut berperan dalam keberhasilan implementasi aturan publik.
- g) Melalui penerapan model ini, dapat dihasilkan evaluasi yang holistik terhadap implementasi kebijakan publik, memungkinkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Model implementasi oleh Merilee S. Grindle mencakup dua faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu muatan kebijakan dan konteks implementasi. Dalam teori Grindle, muatan kebijakan melibatkan faktor-faktor seperti kepentingan, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Konteks implementasi mencakup kewenangan, strategi, keperluan aktor terkait, cirikhas rezim & institusi yang berwenang, serta taraf anggapan dan ketaatan penyelenggara. Muatan kebijakan menitikberatkan pada pentingnya memahami kepentingan yang beragam, jenis manfaat yang berbeda, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program yang kompeten, dan sumber daya yang digunakan. Grindle menekankan perlunya mempertimbangkan strategi, ketangguhan, dan keperluan yang digunakan oleh aktor terkait agar implementasinya berjalan lancar. Lingkungan tempat aturan dijabarkan juga berpengaruh pada keberhasilan implementasi, oleh karena itu pemahaman terhadap cirikhas rezim & institusi yang berwenang perlu diperhatikan. Selain itu, evaluasi keberhasilan implementasi juga perlu memperhitungkan tingkat ketaatan dan responsivitas penyelenggara terhadap kebijakan.

e. Pembangunan

Pembangunan di suatu negara memegang peran krusial dalam mencapai

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, sebagai pengelola negara, memiliki tanggung jawab sentral sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan nasional. Siagian (2008:31) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya perkembangan yang diselenggarakan secara sadar oleh suatu negara. Sementara menurut Aprillia Theresia (2014:44), pembangunan merupakan perbaikan yang bermanfaat untuk mencapai bentuk ekonomi dan sosial yang diputuskan oleh bangsa tersebut. Konsep pembangunan ini berlangsung secara berkala, dimulai dari masyarakat yang tertinggal menuju masyarakat yang maju, seperti dijelaskan oleh Gunawan Sumodiningrat (2004:89).

f. Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam kemajuan suatu daerah atau negara, mencakup sistem, fasilitas, dan jaringan yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Pedroni & Canning (2005:11), infrastruktur bersifat eksternalitas dengan dampak positif, seperti peningkatan akses ke layanan publik. Klasifikasi infrastruktur, seperti infrastruktur keras, infrastruktur keras non-fisik, dan infrastruktur lunak, memberikan pandangan holistik tentang beragam aspek pembangunan. Grigg (1988) mengategorikan infrastruktur menjadi 13 jenis, termasuk penyediaan air, pengelolaan limbah, fasilitas transportasi, sistem kelistrikan, dan komunikasi. Dalam perspektif ini, infrastruktur tidak hanya berupa wujud fisik yang terlihat, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap infrastruktur dalam konteks kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Dengan demikian,

implementasi kebijakan dan proyek infrastruktur dapat lebih efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Pengkajian ini berjenis deskriptif, berpendekatan kualitatif. Muhammad Ramdhan (2021:7), pengkajian kualitatif sifatnya memakai analisa melainkan deskriptif berupa cara pengkajian bertarget guna memberi gambaran sebuah perolehan pengkajian berupa penjabaran serta validasi kejadian yang diamati.

Pengkajian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No.6 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Giriwoyo, Kelurahan Giriwoyo kabupaten Wonogiri" menggunakan jenis pengkajian deskriptif berpendekatan kualitatif karena peneliti dapat melihat dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta atau fenomena yang ada pada objek yang dikaji.

b. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi pengkajian bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kejelasan terhadap lokasi pengkajian. pengkajian diselenggarakan di Kecamatan Giriwoyo, Kelurahan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Giriwoyo memiliki luas 10 060,13 hektar yang terdiri 2 kelurahan dari 16 desa. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian mengenai implementasi

pembangunan infrastruktur. Penulis memilih Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri karena lokasinya yang dekat dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut telah terealisasi dengan baik, dimana terlihat dari kondisi jalan yang sudah baik, khususnya jalan yang melewati dua desa yaitu Desa Ngancar dan Desa Bulurejo di Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.

c. Sumber Data dan Jenis data

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akurat dalam penyusunan penelitian, diperlukan penggunaan berbagai data melalui beragam perolehan yang bisa menolong untuk pengolahan dan analisis data tersebut. Sumber data tersebut dapat berupa penelitian yang memiliki data yang selaras pada pengkajian. sumbernya mencakup kegiatan individu, benda, ranah serta lainnya. Adapun data pengkajian ini terbagi menjadi dua jenis mencakup:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada sumber data yang didapati langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018:456), peneliti akan menghimpun datanya secara bertanya pada narasumber tentang tema yang hendak didalami. Data primer dapat didapati melalui beragam sumber berupa hasil tanya jawab, kuisisioner serta observasi. Pada pengkajian ini memakai perolehan wawancara dengan *face to face*.

b. Data Sekunder

Data ini dapat didefinisikan sebagai sumber data yang tidak diperoleh langsung (Sugiyono, 2018:456). Data tersebut dapat diperoleh melalui berkas serta individu lain. Dipengkajian ini

mencakup jurnal, buku, UU yang selaras pada pengkajian.

Jenis Data

Hal ini berupa himpunan sifat yang wujudnya penjabaran serta angka yang sudah dihimpun serta dikelola sebagai beragam target serta analisa. Pada pengkajian ini memakai data deksriptif kualitatif ialah secara pengkaji menjabarkan perolehan pengkajian yang mencakup kejadian yang hendak dikaji.

d. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut sugiyono (2018:456) menjelaskan pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sutopo (2002:144) tergantung dari jenis sumber data. Menurut Sugiyono (2018:309) teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

f. Validitas Data

Lexy J. Moleong (2012:330) menjelaskan bahwa teknik Triangulasi digunakan dalam uji validitas data pada penelitian ini. Triangulasi adalah teknik yang memanfaatkan suatu hal di luar data yang sedang diteliti sebagai pembanding atau pemeriksaan keabsahan data.

Menurut Sugiyono (2012:195), Triangulasi ialah cara pengujian kredibilitas data yang dilaksanakan secara mengecek data melalui beragam sumber pada periode serta tehnik beragam. Ada 3 tipe triangulasi berupa: triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu.

g. Teknik Analisis Data

Pengkajian ini memakai analisa kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012:337). Menurut mereka, analisa datanya dilaksanakan interaktif serta berkala hingga tuntas. Tahap analisisnya mencakup pengumpulan, verifikasi, penyajian serta diambil simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo. Hasil wawancara dengan kepala kelurahan dan tokoh masyarakat menyoroti tiga aspek penting: transmisi pembangunan infrastruktur, kejelasan informasi, dan tingkat konsistensi pemberi informasi.

Sosialisasi dan rapat dihadiri oleh perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, meskipun ada penyampaian informasi, beberapa warga mengakui kurangnya pemahaman detail terkait peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur. Kepala kelurahan dan tokoh masyarakat sepakat bahwa sosialisasi telah memberikan tingkat

kejelasan informasi yang memadai. Masyarakat umumnya menganggap informasi pembangunan infrastruktur sangat jelas, tetapi beberapa merasa minim pengetahuan terkait peraturan daerah. Pihak kelurahan berusaha memberikan informasi tanpa kurang atau berlebihan, menciptakan konsistensi dalam penyampaian. Dari wawancara dengan masyarakat, tidak ada kendala yang signifikan dalam proses implementasi, menunjukkan konsistensi pemberi informasi dan kesesuaian dengan informasi yang diterima.

Kesimpulannya, meskipun terdapat upaya maksimal dalam implementasi komunikasi, beberapa warga masih merasakan kurangnya pemahaman detail terkait peraturan daerah. Perlu adanya peningkatan dalam transmisi informasi yang lebih rinci untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo tak lepas dari peran faktor sumber daya, termasuk sumber daya keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pembangunan berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri, dengan nominal variatif antara 100.000.000,00 hingga 200.000.000,00 per titik proyek. Menurut Bapak Soegih Mastika, Kepala Kelurahan Giriwoyo, anggaran dari APBD efektif dan memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pendapat tokoh masyarakat, seperti Bapak Yakub dan Bapak Ari, memperkuat bahwa sumber dana utama berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri. Pengalokasian anggaran tersebut terbukti efektif,

sebagaimana diakui oleh kepala kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber daya manusia juga turut berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan konsumsi seperti makanan dan minuman bagi para pekerja proyek.

Kesimpulan dari implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo adalah bahwa faktor sumber daya, terutama sumber daya keuangan dari APBD Kabupaten Wonogiri, memainkan peran krusial dalam keberhasilan proyek-proyek tersebut. Dukungan efektif dari anggaran tersebut, seperti yang diakui oleh Kepala Kelurahan dan tokoh masyarakat, telah menciptakan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pengalokasian anggaran yang baik, didukung oleh kontribusi sumber daya manusia dalam bentuk tenaga dan dukungan konsumsi, berhasil melibatkan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan dalam proses pembangunan.

3. Disposisi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo. Disposisi yang kuat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci kesuksesan implementasi kebijakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Giriwoyo aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pernyataan kepala kelurahan dan pendapat tokoh masyarakat menggambarkan tingginya dukungan dan kontribusi masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti menata batu di pinggir jalan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo memberikan manfaat

yang signifikan. Masyarakat merasakan kemudahan dalam bertransportasi, meningkatkan perekonomian, dan memudahkan akses bagi petani yang hendak menjual hasil pertanian ke kota. Pernyataan kepala kelurahan dan tokoh masyarakat menunjukkan dampak positif yang dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Dapat ditarik kesimpulan partisipasi aktif masyarakat dan manfaat yang nyata, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo dapat dianggap berhasil. Disposisi yang kuat dari pihak berwenang dan dukungan masyarakat menjadi fondasi utama kesuksesan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya disposisi dalam proyek pembangunan lokal dan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan serupa di tempat lain.

4. Struktur birokrasi

Banyak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo. Hasil wawancara dengan berbagai pihak, termasuk kepala kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga, memberikan gambaran yang komprehensif terkait beberapa aspek.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas menjadi kunci kelancaran pelaksanaan kebijakan. Menurut Bapak Soegih Mastika, kepala Kelurahan Giriwoyo, pembagian ini telah terorganisir dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Tokoh masyarakat seperti Bapak Yakub dan Bapak Ari juga mengakui pentingnya kerjasama antara pemerintah, unit terkait, dan masyarakat

dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Koordinasi yang baik antar unit terkait menjadi landasan kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Bapak Soegih Mastika, koordinasi ini sering terjadi, dibuktikan oleh kesan positif dari tokoh masyarakat seperti Bapak Yakub dan Bapak Ari. Warga, seperti Bapak Mulyatno dan Ibu Aulia, juga menyatakan kepuasan mereka terhadap kolaborasi yang baik antar unit terkait, yang secara langsung berkontribusi pada kelancaran pembangunan infrastruktur. Penilaian kinerja dilakukan melalui pemantauan berkala, evaluasi rutin, dan sistem pelaporan. Bapak Soegih Mastika menyatakan bahwa semua langkah ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pendapat serupa diungkapkan oleh tokoh masyarakat seperti Bapak Yakub dan Bapak Ari, serta masyarakat umum seperti Bapak Mulyatno dan Ibu Aulia. Penerapan SOP yang baik tercermin dalam kelancaran dan kualitas optimal pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi struktur birokrasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo berhasil karena pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, dan penerapan SOP yang optimal. Keseluruhan proses ini mencerminkan keterlibatan aktif dan dukungan penuh dari masyarakat, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi keberhasilan kebijakan pembangunan di tingkat kelurahan.

Hasil Pembahasan

Penelitian ini menjelaskan implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Wonogiri No.6 Tahun 2021 tentang Pembangunan

Infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III (1980): Communication (komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Bureaucratic Structure (struktur birokrasi).

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat di Kelurahan Giriwoyo menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami pembangunan infrastruktur, terdapat kebutuhan untuk lebih menjelaskan dasar hukum yang mengatur kebijakan tersebut agar pemahaman masyarakat semakin mendalam.

2. Resources (Sumber Daya)

Efektivitas alokasi anggaran dan partisipasi aktif masyarakat serta kontribusi berupa tenaga dan dukungan material menjadi faktor sukses pembangunan infrastruktur jalan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada sumber daya keuangan dari APBD Kabupaten Wonogiri, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.

3. Disposition (Disposisi)

Partisipasi aktif masyarakat dan sikap transparansi dari pelaksana kebijakan menjadi penentu keberhasilan. Dukungan penuh dari masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi membuktikan pentingnya disposisi yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Giriwoyo.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang efektif antar unit terkait menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan infrastruktur jalan. Penerapan SOP yang baik juga mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo telah mencapai hasil positif, namun memberikan saran untuk lebih memperjelas komunikasi, menggali lebih dalam partisipasi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, terdapat empat indikator utama yang dinilai sesuai dengan kerangka Edward III (1980): Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dinilai baik, terutama melalui metode sosialisasi dengan perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Meskipun mayoritas masyarakat memahami program pembangunan infrastruktur, beberapa masih belum mengenali Perda Kabupaten Wonogiri No.6 Tahun 2021.

2. Sumber Daya

Dana untuk pembangunan infrastruktur jalan berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri, dengan partisipasi

masyarakat yang memberikan sumber daya tenaga, makanan, dan minuman. Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan, menunjukkan keterlibatan warga dalam pembangunan infrastruktur.

3. Disposisi

Partisipasi masyarakat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan infrastruktur, meskipun hanya sebagian kecil yang terlibat secara fisik. Manfaat langsung terlihat dalam peningkatan perekonomian, memudahkan akses petani dan meningkatkan mobilitas sehari-hari.

4. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dinilai baik dan terstruktur. Koordinasi dan kolaborasi antar instansi mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan evaluasi ke empat indikator diatas, implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Giriwoyo dinilai baik, terutama dalam aspek komunikasi, partisipasi masyarakat, dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk perbaikan ke depannya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mendasari program pembangunan infrastruktur dan memperkuat kolaborasi antarinstitusi demi kesinambungan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Imma Widyawati & Hariyani, Septiana. (2023). "Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah". Malang: UB Press.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri. <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/12/169/1/kepdatanpenduduk.html>

Bakri, R., & Bernard Sagrim, Andi Sutra Rimba, M. J. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Policy Implementation of the Hope Family Program in the Bone Regency. 2(2), 139–148.

De Jesus, Rosa (2021) Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu <http://repository.unimor.ac.id/id/eprint/398> Undergraduate thesis, Universitas Timor.

Dianto (2021) "Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Rapulung Sumbawa". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 5(2), 232-234. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1954/163>

Faradis, R. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di 73 Indonesia Pendahuluan Capaian hasil pembangunan suatu negara dapat. 20(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03>

Hariadi, M., Setiawati, B., & Syahrani. (2020). Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Kabupaten Tabalong. 3, 295–305.

Kemenkeu.go.id. "Pembangunan Infrastruktur Jadi Salah Satu Fokus APBN 2023" Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/inform>

asipublik/publikasi/beritautama/Fokus-APBN-2023

Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>.

Lembaga, Y., Islam, P., Riau, U. I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Partai, P., Dalam, P., Ibad, I., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2020). Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Mardiana, A., & Habu, A. (2022). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara. MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2), 135–148. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.161>

Mustari, Nuryanti. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik "Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik". Yogyakarta : Leutika Prio.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 Ramdhan, M. (2021). "Metode Penelitian" Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Sondakh, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala, 1(1), 1–8.

Siregar, Nurmayana. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). JISOS (Jurnal Ilmu Sosial), 1(7).
<https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.